

Menu **Artikel**

Sumpah Pemuda dan Problem Pengangguran

Oleh Zamhuri



Dalam bulan Oktober, ada momen yang sangat spesial bagi para pemuda, tanggal 28 Oktober diperingati sebagai hari sumpah pemuda. Dalam epos perjalanan bangsa, momentum sumpah pemuda dijadikan sebagai salah satu peristiwa penting proses perjuangan bangsa Indonesia dalam menggapai kemerdekaan. Peran para pemuda Indonesia tercatat dengan tinta emas, karena

dengan sumpah pemuda tersebut, nilai, semangat, dan jiwa nasionalisme para pemuda semakin berkobar.

Perasaan senasib sepenanggungan yang dirasakan oleh pemuda menjadi motor inspirasi dalam mempersatukan para pemuda Indonesia. Di bawah kolonialisme, para pemuda bertekad dan bermimpi meraih kemerdekaan. Akankan para pemuda Indonesia saat ini memahami dan menghayati arti penting sumpah pemuda? Bagaimana memaknai sumpah pemuda dalam menghadapi problem bangsa, khususnya problem yang dihadapi oleh para pemuda itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini penting dikemukakan mengingat peran aktif para pemuda sangat menentukan arah perjalanan bangsa.

Ada tema menarik yang disampaikan oleh Kementrian pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada peringatan sumpah pemuda pada tahun ini yaitu "Pemuda Indonesia yang Berjiwa Wirausaha, Berdaya Saing dan Peduli Sesama".

Pemuda berjiwa wirausaha, berdaya saing dan peduli sesama adalah modal penting dalam membangun generasi muda bangsa. Di tengah masih tingginya tantangan pengangguran, jiwa wirausaha sangat relevan untuk ditumbuhkembangkan dan digelorakan oleh para pemuda, terutama para sarjana. Hal ini karena tingkat pengangguran masih menjadi problem para sarjana.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2011, 8,12 juta (6,8 persen) angkatan kerja kita adalah pengangguran terbuka -sama sekali tidak memiliki pekerjaan- dan sekitar 600 ribu (7,6 persen) orang diantaranya para sarjana. Kondisi ini sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan Agustus 2010, penganggur sarjana mencapai sekitar 700 ribu orang (8,5 persen). Karena itu, menjadi penting bagi para sarjana, menebalkan mentalnya menjadi wirausaha sejati. Berusaha mengatasi problem kehidupan tanpa harus bergantung atau menjadi deretan pengantri pencari pekerjaan.

Dalam spirit sumpah pemuda, menggelorakan mental wirausaha menjadi sangat urgen, karena hal tersebut merupakan tantangan nyata para pemuda (mahasiswa dan sarjana) saat ini. Para sarjana harus memiliki spirit mental dan membulatkan tekad untuk tidak lagi menjadi beban dan problem pengangguran.

Sementara pemuda berdaya saing adalah sosok pemuda yang memiliki kompetensi sebagai bekal untuk mengaplikasikan kapasitas dan kemampuannya dalam menghadapi persaingan hidup. Tanpa memiliki daya saing, para pemuda akan tersisih, bahkan mungkin akan ditinggal oleh perkembangan zaman, yang memiliki tingkat akselerasi tinggi. Tanpa daya saing, para pemuda akan gagap dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), yang akhirnya hanya akan menjadi generasi yang tertinggal dan terbelakang.

Sementara tema pemuda peduli sesama sangat penting untuk menggalang solidaritas dan kesetiakawanan sosial. Di tengah

makin menipisnya rasa persatuan, solidaritas, dan kesetiakawanan sosial, dengan makna sumpah pemuda para sarjana hendaknya memiliki kepedulian untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Tanpa persatuan, solidaritas, dan kesetiakawanan sosial, mustahil problem bangsa, terutama problem kepemudaan akan dapat diatasi.

Kita patut prihatin dengan semakin tereduksinya jiwa persatuan, solidaritas dan kesetiakawanan di masyarakat, terutama di kalangan pemuda. Padahal pemuda adalah tulang punggung dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa. Apa yang akan terjadi bila tulang punggung dan calon pemimpin sudah menipis modal utamanya di masa mendatang.

Dengan memiliki mental wirausaha para pemuda akan mampu mengatasi problem pengangguran yang menjadi masalah bangsa. Menurut Kepala UNFPA Jose Feraris, jumlah orang muda berusia 10-24 tahun mencapai 64 juta atau 27 persen dari populasi pendudukan Indonesia. (Kompas, 28/10). Jumlah ini tentu sangat besar, jika mental wirausaha ditanamkan sejak usia muda, maka ketergantungan para pemuda pada orang lain menjadi berkurang.

Demikian juga dengan kemampuan daya saing para pemuda, maka problem kekinian mengenai tingkat persaingan akan mudah dipatahkan jika para pemudanya memiliki daya saing tinggi.

Agaknya problem pengangguran yang saat ini menjadi masalah krusial bagi masa depan pemuda perlu menjadi perhatian para pemuda. Tanpa kepedulian dan peran aktif pemuda, maka problem pengangguran akan menjadi "bom waktu" yang bersifat "high eksplosif" yang bisa mengancam dan meruntuhkan masa depan bangsa.

Dengan momentum sumpah pemuda, saatnya para pemuda memiliki kepedulian dan berperan aktif dalam ikut mengatasi problemnya sendiri. Para pemuda Indonesia harus berikrar

menyatupadukan persepsi dalam rangka mengatasi problem penganguangan di kalangan pemuda itu sendiri. Dirgahayu Sumpah Pemuda.

Zamhuri, *Humas Universitas Muria Kudus, Pimpinan Redaksi Website UMK.*

Catatan Hari Anti Korupsi Bila Korupsi Jadi Tabiat

Oleh Zamhuri



Tanggal 9 Desember diperingati sebagai hari anti korupsi. Pada tahun ini peringatan hari anti korupsi dipusatkan di Semarang. Perkembangan pemberantasan korupsi sendiri belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan. Salah satu indikator bisa dilihat dari hasil evaluasi (riset) terakhir yang dilakukan oleh Transparency

International (TI) menunjukkan *Corruption Perception Index* (CPI) 2011 Indonesia masih selevel dengan negara-negara yang terbelunggu kasus korupsi. Tahun 2011 skor CPI Indonesia 3,0 naik 0,2 dari CPI tahun lalu.

Di kawasan ASEAN, skor Indonesia berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand, sementara Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar skornya lebih rendah dari Indonesia. TI mencatat Singapura sebagai negara yang memiliki skor CPI tertinggi, yaitu 9,2. Dan disusul oleh negara Brunei Darussalam dengan skor 5,2; Malaysia 4,3; dan Thailand 3,4. Kemudian Indonesia 3,0; Vietnam 2,9; Filipina 2,6; Laos 2,2; Kamboja 2,1; Myanmar 1,5. Semakin kecil nilai CPI menunjukkan tingkat korupsinya makin tinggi.

Penilaian minor tingkat korupsi di Indonesia juga dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC). Tahun 2010 menempatkan Indonesia negara terkorup dari 16 negara di Asia Pasifik yang menjadi target investasi.

Lingkar Survey Indonesia pada tahun ini juga melakukan survey tentang persepsi publik atas praktek mafia hukum di lembaga penegak hukum di Indonesia. Menurut LSI mayoritas publik (55%) menilai ada banyak praktek mafia hukum di lembaga hukum. Hanya 17,4% saja yang menilai jumlah mafia hukum kecil dan 1,2% saja yang menilai tidak ada sama sekali. Menurut hasil survey ini publik menilai ada banyak praktek mafia hukum di lembaga penegak hukum.

Akhir bulan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah daftar negatif integritas pelayanan publik di Indonesia. Melalui instrument survey KPK menilai secara keseluruhan nilai dari Indeks Integritas Nasional adalah 6,31 dengan rata-rata nilai integritas instansi pusat (7,07) dan vertikal (6,40) lebih tinggi dibanding rata-rata nilai integritas pemerintah daerah (6,00). Dari penilaian KPK terdapat 43 persenyaitu sebanyak 37 instansi/pemda yang nilai integritasnya masih di bawah rata-rata nasional. Tiga instansi menurut KPK dengan indeks terburuk yaitu Kementerian Agama 5,37, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5,44 3, dan Kementerian Koperasi dan UKM 5,52. Sementara kota dengan integritas terburuk antara lain; Metro Lampung 3,15, Depok 3,5, Serang 3,54, Semarang 3,61, Manokwari 3,7, Ternate 4,07, Palembang 4,25, Bogor 4,27, dan Lubuk Linggau 4,38. (<http://setagu.net/survey/survey-integritas-kpk-2011>)

Menurut KPK, Kota Semarang menjadi salah satu kota dengan integritas terendah. Penilaian ini sejalan dengan tertangkapnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang dengan beberapa anggota DPRD Kota Semarang beberapa waktu lalu, dalam kasus korupsi yang saat ini perkaranya dalam proses penanganan KPK.

Tabiat Korupsi

Tindakan dan perilaku korupsi di Indonesia seakan sudah menjadi tabiat (kebiasaan). Sampai-sampai tokoh sekaliber Prof. Mahfud MD, ketua Mahkamah Konstitusi putus asa dan frustasi.

Mahfudz mengusulkan jalur-jalur non hukum (positif) yaitu mengusulkan adanya ladang khusus bagi koruptor dan koruptor yang meninggalk tidak disholatkan. Sikap *apriori* Mahfudz berasal, karena praktis semua usaha untuk menindak praktek korupsi dan melawan koruptor hampir “kehabisan” akal. Para aparat hukum yang seharusnya menjadi tokoh sentral pemberantasan korupsi justru menjadi bagian yang harus diperangi.

Teori Lawrence M Friedman, tentang syarat bekerjanya sistem hukum yaitu kesetupaduan antar komponen hukum yaitu Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Kultur Hukum tidak berjalan sama sekali. Struktur dan kultur hukum di Indonesia sangat ramah, adaptif dan kondusif bagi tumbuh suburnya tabiat korupsi di Indonesia. Sampai-sampai di sekeliling kita, tidak bisa membedakan lagi mana koruptor dan mana yang bukan. Karena pelaku korupsi (koruptor) di Indonesia adalah bisa-bisa salah satu dari anggota kerabat atau teman (karib) kita.

Sebagus-bagusnya substansi hukum (UU dan regulasi) tentang korupsi kalau struktur (aparat penegak hukum) dan kultur (realitas sosial) masih belum mendukung, pencegahan dan penindakan korupsi masih jauh panggang dari api atau bagaikan menegakkan benang basah.

Dalam kajian Robert B Seidman bekerjanya sistem hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor dan sistem sosial yang lain. Baik pada saat pembuatan peraturan, penerapan aturan maupun aktor-aktor pemegang peran sangat dipengaruhi oleh faktor non hukum. Karena itu, penegakkan dan penindakan korupsi di Indonesia harus didukung oleh semua komponen bangsa dan semua sistem sosial, dan pelibatan faktor-faktor non hukum untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi tidak mungkin hanya kita tumpukan tanggung jawabnya pada KPK.

“Pohon korupsi” saat ini seolah-olah semakin tambah kuat “akarnya”. Hal ini setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK) mensinyalir banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) muda yang melakukan praktik pencucian uang dari anggaran Negara. (Suara Merdeka, 7/12). Menurut PPATK terdapat 1818 rekening bermasalah yang terindikasi tindak pidana. Jumlah PNS muda sendiri ada sekitar 1,5 juta orang dari 4,64 juta PNS, mereka menerima gaji dan rumenerasi maksimal Rp.12 juta per bulan.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi bukan mengendur tetapi justru menggurita. Pemberantasan korupsi tidak mungkin hanya mengandalkan aparat hukum, dengan motor KPK, tetapi juga keterlibatan semua komponen bangsa. Jadi amat mungkin dan diperlukan upaya-upaya non hukum seperti dilontarkan oleh Mahfudz MD. Hal ini diperlukan agar kita bisa membedakan yang mana karib kita yang menjadi koruptor. Sehingga target Abraham Samad, ketua KPK, indeks CPI Indonesia sama atau di atas skor 4,0 bisa tercapai. Semoga.

Zamhuri, *Humas Universitas Muria Kudus, Pimpinan Redaksi Website UMK.*



Belajar Dari Sumur Rumah Adat Kudus

Oleh Zakki Amali

Kebutuhan air bagi manusia sangat mutlak. Pada masyarakat tradisional, saat mesin pompa air belum dikenal, manusia menggali tanah untuk mendapatkan air. Di daerah yang tidak dekat dengan sumber air, seperti sungai dan mata air, manusia membuat sumur untuk memenuhi kebutuhannya.

Saat ini, Konsep tentang sumur telah berkembang. Dalam keluarga, sumur merupakan salah satu instrumen kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat ditinggalkan. Maka, untuk memenuhinya konsep sumur dilekatkan dengan tata ruang sebuah rumah.

Dalam konsep rumah adat Kudus, sumur terletak di luar rumah. Tidak seperti konsep rumah sekarang yang menempatkan sumur di dalam rumah, atau bahkan mereduksinya dengan teknologi : pompa air.

Letak sumur dalam Rumah Adat Kudus sarat makna. Setidaknya ada tiga makna filosofis di dalamnya (Nawanto, 2009). Pertama, merupakan media perjodohan. Dahulu perempuan Kudus masa mudanya dipinggit, tidak boleh keluar dari rumah. Langkah ini untuk menjaga agar anak perempuannya tidak berperangai jelek di kemudian hari. Era ini mengingatkan kita pada kisah RA Kartini yang pinggit sewaktu muda dan hendak menikah.

Dengan adanya sumur, seorang gadis dapat memperkenalkan diri dan si laki-laki yang hendak meminangnya dapat melihatnya. Sehingga dari kedua belah pihak tidak ada yang merugi dengan pilihannya.

Kedua, sumur sebagai ruang publik. Ini selaras dengan basis kebutuhan manusia yang sangat membutuhkan air. Sumur

berfungsi secara sosial. Para tetangga yang tak mempunyai sumur dapat ikut mengambil air dengan cuma-cuma. Secara langsung maupun tidak, aktivitas ini mempererat hubungan sosial dalam bermasyarakat. Pada titik ini sumur adalah simpul kearifan sosial yang menyiratkan pentingnya hubungan sosial, dan mengikis individualisme.

Ketiga, sumur mempunyai fungsi magis. Orang Jawa dahulu mempercayai mitologi adanya Buta Cakil, semacam roh halus yang mengganggu ketenangan manusia. Sehingga untuk mengusirnya, dalam konsep rumah adat Kudus, harus membersihkan diri sebelum memasuki rumah. Agar terhindar dari aura atau pengaruh Buta Cakil yang dibawa dari luar rumah. Dalam praktiknya seseorang harus mencuci kaki sebelum masuk rumah.

Kontekstualisasi

Dalam era kekinian, ketiga fungsi sumur dalam Rumah Adat Kudus, tampaknya sudah memudar. Karena letak sumur dalam rumah orang Kudus saat ini berada di dalam rumah. Kita dapat menjumpai model sumur di luar rumah hanya pada rumah orang Kudus tempo doeloe.

Di sini bukan bermaksud membuat sebuah gerakan kembali pada era dahulu dengan segala aksesorisnya, tetapi mengajak untuk merenungi dan mengambil pelajaran darinya. Konsep sumur dalam Rumah Adat Kudus mengandung makna dan arti yang masih relevan dipraktikkan hari ini. Setidaknya sesuai dengan makna dan fungsi terdahulu yang dibingkai dalam refleksi sejarah.

Soekarno selalu mengingatkan untuk tidak melupakan sejarah, "Jasmerah", kata Soekarno. Karena di dalam sejarah terdapat pelajaran penting dalam kehidupan. Begitu pentingnya sejarah, Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan : Sebuah Refleksi Sejarah* (2009),

menekankan untuk melihat sejarah sebagai landasan berpijak di hari ini, agar tidak tersesat pada pemahaman dan praktik keberagaman di Indonesia.

Memaknai sumur tersebut dalam bingkai sejarah, kita akan menemukan nilai-nilai kearifan orang zaman dahulu yang sangat sulit ditemukan. Pertama, dalam fungsi perjodohan, kita akan dapat menarik ke zaman kini, sebagai sebuah cara menjaga kehormatan perempuan, agar tidak mudah terampas dan ternodai. Dengan perkataan lain, keluarga mempunyai kewajiban penting untuk menjaga anak gadisnya agar tak berbuat asusila dalam bermasyarakat.

Kedua, kita dapat belajar akan pentingnya saling tolong menolong, sebagaimana fungsi sumur sebagai ruang publik. Dengan sikap itu, kehidupan sosial kita akan berjalan tenang dan tentram. Hingga kita memandang tetangga seperti saudara dan keluarga sendiri. Apalagi di era komputasi saat ini yang cenderung menonjolkan individualismenya dan segalanya diukur dengan paramater uang dan benda.

Ketiga, ternyata konsep magis dari orang zaman dahulu sangat berguna untuk bidang kesehatan. Lepas dari benar tidaknya mitos adanya Buta Cakil, konsep tersebut mampu menjadikan masyarakat masa kini untuk sadar akan pentingnya hidup bersih. Tidak hanya secara lahir, tetapi batin. Asosiasi mitos yang dilekatkan dalam konsepsi sumur tersebut, tampaknya, hendak berpesan kepada kita untuk jangan melupakan kebersihan batin, selain lahir. Barangkali tepat, seperti diungkapkan Mukallam (2009), bahwa mitos mempunyai nalarnya sendiri. Nalar yang menyiratkan kearifan. Di sini kita dapat memetik pelajaran dari mitologi yang melekat di dalam fungsi sumur sebagai pembersih raga dan jiwa.

Kita sering tak menyadari kearifan semesta berada di sekitar kita. Sumur menjelma menjadi simbol sumber kehidupan yang menyiratkan pesan kearifan lokal. Dengan perkataan lain, sumur

adalah sumber inspirasi kehidupan.

Keberadaan Rumah Adat Kudus sebagai media pembelajaran kehidupan perlu dilestarikan. Rumah adat Kudus yang saat ini sangat terbatas jumlahnya harus tetap dipertahankan. Bukan berarti masyarakat Kudus harus mulai membangun rumah lagi, sebagaimana konsepsi Rumah Adat Kudus, tetapi masyarakat Kudus khususnya, harus merenungkan makna filosofis keberadaan sumur dalam konsepsi Rumah Adat Kudus. Dengan bekal itu, diharapkan hubungan sosial antar warga yang mulai renggang akibat konflik-konflik kecil dan tidak berarti, mereda. Konsep *back to nature* dalam konteks ini sangatlah relevan, karena konsep sumur dalam Rumah Adat Kudus mempunyai pelajaran untuk bekal kehidupan yang sangat berharga.

Zakki Amali, peneliti Lembaga Studi Sosial dan Budaya Sumur Tolak, Kudus.

Naskah Juara I UMK Media Competition

Darul Ilmi dan 'Peradaban Baru'

Pantura Timur Jateng

Oleh Rosidi



Masjid Darul Ilmi di UMK, bisa menjadi pionir untuk melahirkan "peradaban baru" bagi dunia intelektual sekaligus memberikan kontribusi positif dalam membangun bangsa, khususnya di wilayah Pantura

Timur Jateng.

Di ruang yang cukup luas, sekitar satu bulan sebelum menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli (Kosahli) Kepolisian Republik Indonesia, tepatnya 1 Juni 2011, Irjen Polisi Edward Aritonang menjadi salah satu narasumber dalam seminar "Revitalisasi Pendidikan Karakter sebagai Upaya Melindungi Generasi Bangsa" yang diselenggarakan Universitas Muria Kudus (UMK).

Edward Aritonang, yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jateng, bersama tiga narasumber lain, yaitu Dr Ahmad Tafsir MAg (IAIN Walisongo Semarang), Drs Muchamad Yuliyanto MSi (Undip Semarang), Iskandar Wibawa SH MH (Korda FKA-ESQ Kudus) dan Prof Dr dr Sarjadi SP PA (Rektor UMK) sebagai keynote speaker, didaulat mengemukakan berbagai perspektifnya di seminar memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Darul Ilmi di perguruan tinggi terbesar di wilayah Pantura Timur Jateng itu.

Bukan lantaran Edward adalah seorang inspektur jenderal dan kapolda sehingga menarik perhatian. Tetapi tempat diselenggarakannya seminar itulah yang menarik dan menginspirasi hadirnya judul tulisan ini. Apalagi keberadaan masjid yang berada di tengah-tengah kampus, yang semestinya akrab dengan tradisi intelektual.

Kehadiran sekitar 400 peserta yang terdiri atas dosen, mahasiswa, dan pelajar, juga menjadi penegas, bahwa kehadiran Masjid Darul Ilmi di tengah-tengah kampus UMK, tidak sekadar "tempat ibadah" yang memiliki penyempitan makna dan guna, tempat shalat dan mengaji saja. Tetapi memiliki makna besar bagi segenap civitas academica untuk berdialektika dan melakukan kajian-kajian intelektual di dalamnya.

Kilas Balik

Masjid memiliki peranan yang sangat besar dalam tradisi intelektual dan perkembangan peradaban Islam. Salim Sholeh Almuhdor (2008) mengemukakan, di awal-awal perkembangan Islam, masjid tidak semata sebagai tempat shalat, tetapi menjadi pusat dakwah, keilmuan, dan mendiskusikan berbagai persoalan sekaligus untuk mencari solusi atas pelbagai persoalan sosial yang muncul.

Sekolah pertama kali hadir di masjid pada 653 M di Madinah, yakni pada masa Dinasti Umayyah, lalu di Damaskus pada 744 M. Dan sejak tahun 900 M, hampir setiap masjid memiliki sekolah untuk mendidik anak-anak muslim.

Kegiatan-kegiatan intelektual di masjid, tidak sekadar mempelajari baca-tulis saja. Di sana, para murid juga mempelajari teologi, bahasa Arab, logika, aljabar, astronomi, biologi, sejarah, ilmu hukum, dan lain sebagainya. Masjid telah menjadi "laboratorium" ilmu dan riset, sehingga tak heran jika aktivitas intelektual di "rumah Tuhan" itu melahirkan cendekiawan-cendekiawan yang sangat brilian.

Ibnu Rusyd, Ibnu Bajja, Imam Sibawaih, Ibnu Khaldun, Ibnu Al-Khatib, Al-Bitruji, Ibnu Harazim, Ibnu Maimoun, Ibnu Wazzan, Ibnu Al-Haitham, dan Al-Baghdadi, adalah beberapa di antara cendekiawan muslim yang dilahirkan di masjid dalam dinasti yang berbeda.

Ada beberapa hal yang menjadikan pusat kajian Islam di berbagai masjid waktu itu, mengalami sukses luar biasa. Pertama, pusat aktivitas. Masjid pada awal Islam menjadi pusat aktivitas keislaman, mulai dari intelektual (pendidikan), ekonomi, hukum, dan aktivitas sosial lain. Itu sekaligus didukung oleh keadaan bahwa pendidikan merupakan salah satu pilar penting untuk membangun Islam yang kuat (kokoh).

Kedua, adanya perpustakaan. Masjid-masjid di awal-awal keemasan Islam, dilengkapi dengan perpustakaan. Selain sebagai referensi, buku-buku (kitab) yang ada mendorong para pengkajinya untuk melakukan kajian lebih lanjut. Selain itu, dalam banyak literatur disebutkan, keberadaan perpustakaan masjid di awal-awal Islam, menginspirasi umatnya untuk menyumbangkan buku (kitab) yang dimilikinya, sehingga menjadikan pusat-pusat pengkajian di masjid semakin semarak.

Peradaban Baru

Aktivitas intelektual di masjid-masjid pada awal-awal Islam telah melahirkan peradaban yang sangat gemilang, yang kemudian dikenal dengan the golden age of Islam. Perguruan tinggi-perguruan tinggi bergengsi lahir dari sana. Al-Azhar (Mesir), Al-Qarawiyyin (Maroko), Al-Qayrawwan dan Al-Zaituna (Tunisia). Berbagai universitas ini pun menarik minat para mahasiswa Islam dari berbagai belahan bumi untuk datang, hingga saat ini.

Masjid yang di masa awal-awal Islam telah memberikan sumbangsih tak terperikan dalam peradaban dunia, inilah yang menarik dijadikan sebagai cermin. Mengapa dengan banyaknya masjid sekarang ini, tak lagi mampu menelurkan cendekiawan-

pendidikan, minimal melahirkan generasi bangsa yang cerdas, berwawasan luas, dan berkarakter?

Kesadaran ini muncul saat sebuah seminar digelar di Masjid Darul Ilmi Universitas Muria Kudus, awal Juni lalu. Pertanyaannya kemudian, mengapa tidak UMK mengambil peran mulia dalam rangka membangun kualitas intelektual umat Islam, minimal untuk para mahasiswa di kampusnya?

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (NKPRMI), November 2006 lalu mengatakan, masjid memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan peradaban umat Islam. Masjid tidak hanya tempat menunaikan ibadah shalat, tetapi semestinya juga berperan sebagai pusat pendidikan dan penyebaran syiar Islam dan menyelesaikan berbagai persoalan umat.

Dan UMK yang notabene salah satu universitas yang cukup besar di Pantura Timur Jateng, memiliki peluang yang besar dalam rangka "membangun peradaban baru" di wilayah ini, dengan berbagai kajian intelektual yang bisa dimulai dari Masjid Darul Ilmi.

Pertama, tempat memadai. Masjid Darul Ilmi yang cukup megah di kampus itu, memiliki ruang yang sangat luas bagi aktivitas intelektual, baik diskusi maupun seminar.

Beberapa kegiatan diskusi dan seminar pun sudah beberapa kali digelar Masjid ini, sehingga tinggal memaksimalkannya untuk aktivitas-aktivitas intelektual lain. Di Pantura timur Jateng yang di antaranya meliputi Kudus, Pati, dan Rembang, terdapat banyak persoalan sosial ataupun lingkungan. UMK bisa memberikan kontribusi pemikiran terkait berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Kedua, peningkatan kualitas SDM. Dengan banyaknya aktivitas intelektual, tentu akan berdampak positif bagi peningkatan

kualitas sumber daya manusia (SDM) di UMK, baik dosen maupun mahasiswa. Grup-grup diskusi akan bermunculan, yang pada gilirannya akan menghasilkan berbagai pemikiran yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Tetapi untuk itu, memang tidak bisa sekadar mendorong dosen dan mahasiswa supaya memanfaatkan ruang di Masjid Darul Ilmi itu sebagai ruang berdialektika dan melakukan kajian-kajian intelektual. Setting ruang menjadi penting untuk diperhatikan sehingga dosen dan mahasiswa kerasan dan merasa nyaman. Selain itu, perlu kiranya masjid dilengkapi perpustakaan, agar referensi bisa mudah didapat saat mereka membutuhkannya, tanpa harus ke perpustakaan fakultas atau universitas.

Membuat perpustakaan masjid, tentu membutuhkan anggaran yang cukup besar. Tetapi mengapa tidak mencoba mendorong gerakan wakaf buku untuk mendirikan perpustakaan di Masjid Darul Ilmi sebagaimana pernah dilakukan oleh dinasti ke-khalifah-an pada masa-masa awal Islam?

Di tengah-tengah masih banyaknya problem kebangsaan yang multidimensi, peranan masjid, khususnya masjid-masjid kampus seperti Masjid Darul Ilmi sangat diperlukan. Yaitu dalam rangka ikut mencarikan solusi atas berbagai persoalan yang ada. Masjid Darul Ilmi di UMK, bisa menjadi pionir untuk melahirkan "peradaban baru" bagi dunia intelektual sekaligus memberikan kontribusi positif dalam membangun bangsa, khususnya di wilayah Pantura Timur Jateng. Hal sama perlu dilakukan oleh masjid-masjid lain secara umum, yang sudah semestinya ikut mengambil peran dalam pembangunan bangsa dan Islam. (24)

Rosidi, *wartawan Suara Merdeka Biro Muria.*



Kurikulum Berbasis Kompetensi di PT

Oleh Much Harun

KURIKULUM pendidikan di perguruan tinggi (PT) telah mengalami perubahan. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Nasional nomor 045/U/2002. Keputusan ini menuntut semua PT, baik negeri maupun swasta, mengubah kurikulum 1994 menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Keputusan Kemendiknas ini mengarah atas saran The International Bureau of Education dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) atau lebih dikenal dengan The International Commission on Education for the 21st Century. Komite ini mengarahkan PT untuk memegang empat pilar dasar yang terdiri atas learning to know (belajar untuk tahu), learning to do (belajar untuk melakukan), learning to be (belajar untuk menjadi) dan learning to live together (belajar untuk hidup bersama).

Di sini, mahasiswa dituntut untuk bisa melakukan tindakan cerdas, penuh tanggungjawab, sebagai syarat untuk di anggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidangnya, dan masyarakat adalah penilainya.

Selain itu, penilaian di KBK tidak lagi hanya sebatas angka. Tidak ada lagi yang namanya ujian tengah semester ataupun ujian semester. Namun tugas yang diberikan kepada mahasiswa lebih berat karena evaluasi mencakup tiga hal, yakni kognitif (berpikir), psikomotorik (berbuat) dan afektif (bersikap).

Kognitif berarti mahasiswa harus bisa berpikir secara jernih dengan menggunakan intelektualitasnya sebagai mahasiswa. Mereka dituntut tidak hanya menggunakan otot atau kebiasaan

dalam menentukan sesuatu. Jauh dari pada itu, akal adalah yang paling relevan untuk menunjukkan sikap seorang mahasiswa dalam mengambil keputusan.

Keberadaan kognitif ini didasari oleh teori Blom. Teori yang menjelaskan ke mana dan apa yang akan didapat ketika arah kognitif ini bisa berjalan dengan baik. Kognitif mahasiswa diharapkan bisa mencapai pada arah membuat. Jadi mahasiswa tidak memahami bahkan mengingat pelajaran, namun bisa membuat sesuatu untuk mengaplikasikannya.

Teori Harrow menjadi dasar pada ranah psikomotorik. Psikomotorik ini memerlukan gerak dari keserasihan badan dan saraf untuk mendapatkan nilai yang bagus. Pada ranah ini diharapkan mahasiswa bisa mengerjakan sesuatu melalui kebiasaan mereka.

Di sini, mahasiswa tidak harus berpikir berulang kali untuk melakukan sesuatu. Karena teori Harrow akan menjadikan mahasiswa spontan untuk menjalankan apa yang biasa dia pelajari. Ketika mahasiswa belajar bahasa Inggris, maka kemampuan bahasanya akan menjadi sebuah kebiasaan tanpa harus berpikir susunan kata, ataupun tata letaknya.

Penilaian terakhir dalam KBK adalah afektif. Ini adalah pokok dari semuanya. Mahasiswa akan menjadikan ilmu yang didapatkannya di dalam PT menjadi sebuah pola hidup. Dalam bahasa UNESCO adalah *learning to live together*.

KBK juga menuntut mahasiswa mengarah pada student center learning (SCL). Beda dari kurikulum yang sebelumnya yang berpusat pada guru, dalam KBK mahasiswa yang harus proaktif dalam kegiatan untuk bisa mendapatkan materi pembelajaran yang baik. Dosen hanya menjadi seorang fasilitator.

Perbedaan

Ini juga yang membedakan kurikulum lama dan kurikulum

KBK. Dulu dalam perkuliahan, mahasiswa hanya ditransfer ilmu dari dosennya. Beda dari KBK, mahasiswa harus bisa lebih aktif dan mencari literatur luar untuk mendapatkan ilmu yang diinginkan.

Di Universitas Muria Kudus, hampir semua prodi sudah menerapkan sistem KBK. Meskipun ada yang belum, namun harapannya, tahun ini semua prodi sudah menggunakan KBK. Keberadaan ini tidak lepas dari peran Rektor UMK yang juga menjadi salah satu penggagas keberadaan KBK di PT.

Namun permasalahannya adalah keberadaan KBK, terutama di PTS seperti tempat kuliah penulis. PT masih membutuhkan pembenahan. Terutama sistem KBK yang membutuhkan banyak kelas, karena hanya kelas kecil yang maksimal mahasiswanya 20, KBK ini bisa dijalankan secara maksimal. Hal ini dikarenakan dosen harus bisa mengerti dan mengetahui kemampuan setiap mahasiswanya.

Keberadaan ini tidak diimbangi oleh pemerintah untuk membantu sarana prasarana untuk menciptakan KBK yang berkualitas. Pemerintah hanya memberikan sistem dan harus dijalankan semua PT tanpa melihat kondisi real di setiap PT.

Ketika itu dipaksakan, pasti akan ada kenaikan untuk menutupi kekurangannya. Atau kurikulum itu dipaksakan dengan seadanya. Seharusnya, pemerintah lebih serius apabila benar-benar ingin menjadikan KBK dilaksanakan. (24)

Much Harun, mahasiswa Universitas Muria Kudus, aktif di Lembaga Pers Kampus Pena Kampus dan pernah riset tentang KBK.

Cerdas & Santun



www.umk.ac.id **muria@umk.ac.id**

Culture University

ISBN 978-602-99614-2-3



9 786029 996142